BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dibandingkan penerimaan lainnya. Pajak memiliki tujuan menjejahterakan bangsanya secara tidak langsung dengan cara memperbaiki serta membangun sarana publik. Pajak merupakan landasan utama untuk membangun bangsa untuk mencapai tujuan tertentu.

Penerimaan Pajak di Indonesia dibagi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian keuangan. Contoh pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Contoh pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu pajak terbesar dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) per 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 321.060 triliun (angka sementara) atau sebesar 63,91% dari pendapatan pajak keseluruhan, yang sebesar Rp. 598.270 triliun (angka sementara). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak Penghasilan (PPh) akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia salah satunya, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas (Pohan 2013:69). Mengingat Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 juga termasuk salah satu sumber penerimaan negara, di sisi lain, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan biaya bagi perusahaan karena beban Pajak Penghasilan (PPh) ini akan mengurangi laba perusahaan.

Banyak kasus pajak yang terjadi dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang

dibayarkan. Dari perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangannya hingga sampai menyuap para petugas pajak, agar jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan adanya perusahaan tidak ingin mengurangi laba yang diperoleh dari perusahaan. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan laba, dan menimalkan beban pajak tetapi tidak melanggar peraturan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Dengan adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*), peluang untuk penghematan pajak dapat dilakukan pada PPh 21 atas penghasilan yang diterima karyawan. Menurut Zain (2008:89) menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Alternatif yang pertama adalah *gross method*, yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Alternatif kedua yang dapat dipilih adalah *net basis*, yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga adalah metode tunjangan pajak, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Alternatif keempat disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

PT. X merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di perdagangan minuman. PT. X mulai beroperasi pada tahun 2013, karena PT. X ingin melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak seminimal mungkin tetapi masih dalam konteks undang-undang perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan PT X antara lain adalah berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) baik perorangan maupun badan. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi bahwa pegawai adalah orang pribadi yang merupakan salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Dalam perencanaan pajak perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan PT X menggunakan *net basis* untuk 5 (lima) orang karyawan dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Lima orang ini merupakan direktur, *general manager*, dan 3 (tiga) orang komisaris di PT.X yang mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karena itu manajemen PT. X mengambil kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21 untuk 5 (lima) orang karyawan tersebut. Cara ini sangat menguntungkan bagi karyawan karena mengakibatkan *take home pay* yang diterima karyawan tidak dipotong dengan PPh Pasal 21, tetapi bagi perusahaan cara ini kurang menguntungkan karena biaya

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus ditanggung semua oleh perusahaan dan biaya tersebut tidak bisa diakui dalam fiskal. Kondisi yang tidak bisa menguntungkan bagi perusahaan ini, diperlukan perencanaan pajak untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menguntungkan kedua belah pihak baik pihak perusahaan dan pihak karyawan. Untuk itu dalam pembahasan ini pokok-pokok permasalahannya, adalah berapakah Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan, PT. X pada tahun 2015 sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak dan bagaimanakah penghematan yang dihasilkan dengan adanya perencanaan pajak terhadap laba perusahaan? Oleh karena itu magang ini berjudul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN 21 PT X (STUDI MAGANG PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK HR CONSULTING, SURABAYA).

1.2. Ruang Lingkup

Dalam tugas akhir magang ini, penulis membahas mengenai perencanaan pajak, penghitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2015 bagi pegawai tetap, dengan menggunakan empat metode di PT X. Penulis membahas mengenai bagaimana keseluruhan proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sampai pada perencanaan pajak PPh Pasal 21 tahun buku 2015.

1.3. Manfaat

Manfaat dari tugas akhir magang adalah :

a. Manfaat akademik

Dengan melaksanakan magang ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang perpajakan bagi para pemegang. Kerja praktik ini diharapkan dapat menambah kepustakaan untuk penelitian di bidang yang sama, agar dapat memberikan masukan di bidang perpajakan dan dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik, serta memberikan bekal pada mahasiswa untuk mampu menghasilkan tenaga kerja yang handal.

b. Manfaat praktik

1. Bagi penulis

- a. Memperoleh tempat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam praktik dunia kerja.
- c. Memperoleh banyak koneksi perusahaan, untuk mempermudah dalam mencari pekerjaan baru.

2. Bagi HR Consulting

- a. Memperoleh kesempatan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya dalam keberlangsungan kerja sama tempat magang,

- b. Mempermudah HR Consulting dalam mencari pegawai baru dengan merekrut mahasiswa magang.
- c. Meringankan beban pekerjaan karyawan dalam menyelesaikan tugasnya di HR Consulting.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Bab ini berisi empat sub bab yaitu latar belakang, manfaat magang, ruang lingkup laporan magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan pembahasan teoritis tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengemukakan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan magang ini seperti konsep perpajakan, fungsi dan jenis jenis pajak, subjek dan objek pajak penghasilan PPh Pasal 21, waktu pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21, cara penghitungan PPh Pasal 21, serta perencanaan pajak PPh Pasal 21.

BAB 3: Metode Penelitian

Bab ini berisi gambaran umum tentang desain penelitian, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data,

prosedur analistis data, tempat kegiatan magang berlangsung, serta perusahaan sebagai objek magang.

BAB 4: Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi seluruh kegiatan yang penulis lakukan selama kegiatan magang berlangsung dan menjelaskan permasalahan yang menjadi dasar topik penulisan laporan magang ini.

BAB 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan memberikan saran yang diperlukan untuk membuat PT. X agar lebih mematuhi peraturan perpajakan secara efektif dan efisien.